



IRIAN BARAT DI MATA SULTAN ZAINAL ABIDIN SYAH: DARI KONFERENSI MALINO HINGGA OPERASI TRIKORA

Febi Anggono Suryo

Ilmu Sejarah, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

febianggono16@student.uns.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 18-05-2023

Disetujui: 28-06-2023

Kata Kunci:

Sultan Zainal Abidin
Kesultanan Tidore
Irian Barat
Trikora

Keywords:

*Sultan Zainal Abidin
Sultanate Tidore
West Irian
Trikora*

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan dari Sultan Zainal Abidin Syah dari Kesultanan Tidore mengenai Irian Barat dalam usahanya mengembalikan Irian Barat ke Tidore dan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan heuristik berupa: studi literatur, studi dokumen dan wawancara, kemudian kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa upaya dari Belanda memisahkan Irian Barat dari Indonesia, diawali dengan diadakannya konferensi Malino yang membuat wilayah Indonesia menjadi negara federal yang lantas membuat Sultan Zainal Abidin Syah keberatan. Upaya dari Belanda untuk bernegosiasi mengenai masalah Irian Barat juga dilakukan dengan cara mengajak Sultan Zainal Abidin dan Sultan Ternate menaiki kapal perang Belanda menuju Hollandia (sekarang Jayapura). Pasca bubarnya Republik Indonesia Serikat, Sultan Zainal Abidin diberikan mandat oleh Presiden Soekarno untuk membantu mengklaim wilayah Irian Barat agar masuk ke dalam Indonesia, yang pada tahun 17 Agustus 1956 kemudian diangkat menjadi Gubernur Provinsi Irian Barat yang pertama dengan ibukotanya Soa-sio, Tidore. Sultan Zainal Abidin menjadi Gubernur Irian Barat hingga tahun 1961, dan setelahnya membantu dalam usaha persiapan operasi Trikora.

Abstract: *This study aims to explain the views of Sultan Zainal Abidin Syah of the Tidore Sultanate regarding West Irian in his attempt to return West Irian to Tidore and Indonesia. The research method used is the historical method with heuristics in the form of: literature studies, document studies and interviews, then criticism, interpretation and historiography. The results of this study explained that the efforts of the Dutch to separate West Irian from Indonesia, began with the holding of the Malino conference which made the territory of Indonesia a federal state which then made Sultan Zainal Abidin Syah object. Efforts from the Netherlands to negotiate the West Irian issue were also made by inviting Sultan Zainal Abidin and the Sultan of Ternate to board a Dutch warship to Hollandia (now Jayapura). After the dissolution of the United States of Indonesia, Sultan Zainal Abidin was given a mandate by President Soekarno to help claim the territory of West Irian so that it would be included in Indonesia, who on 17 August 1956 was later appointed Governor of the first Province of West Irian with its capital Soasio, Tidore. Sultan Zainal Abidin served as Governor of West Irian until 1961, and thereafter assisted in the preparatory efforts for the Trikora operation.*



<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.15259>

SA license



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

A. LATAR BELAKANG

Pasca pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan dirinya menjadi negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun kenyataannya,

setelah proklamasi Belanda masih merongrong kebebasan Indonesia dengan menguasai beberapa wilayah. Keadaan ini semakin rumit ketika sekutu memenangkan perang dunia kedua dan menyerahkan kekuasaan Indonesia ke Belanda melalui perundingan *Civil Affairs Agreement* di London.

Upaya dari Belanda ini ditentang kuat oleh Indonesia, dengan berbagai perlawanan hingga perundingan di beberapa daerah. Irian Barat menjadi daerah yang belum juga dilepaskan oleh Belanda sejak dikumandangkannya proklamasi di Yogyakarta. Hal ini membuat Sultan Zainal Abidin dari Kesultanan Tidore mengupayakan pembebasan Irian Barat dari cengkeraman Belanda dengan berbagai perundingan.

Kesultanan Tidore merupakan salah satu Kerajaan Islam yang berada di daerah Maluku, yang menurut catatan telah hadir pada tahun 1274 Masehi. Awal Kesultanan Tidore melakukan kontak dengan Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) adalah sekitar tahun 1657 di masa Sultan Saifuddin, yang mampu menstabilkan kerajaannya dan memperoleh legalitas serta mengupayakan legitimasi yuridis dan praktis atas Kepulauan Raja Ampat dan Papua Daratan dari Belanda.

Pada 13 Maret 1667, Laksamana Speelman yang merupakan petinggi VOC berkunjung ke Ternate dan mengadakan pertemuan bilateral di Benteng Oranje. Pada pertemuan ini, Sultan Saifuddin dan VOC menyepakati perjanjian bahwa Raja Ampat dan Papua Daratan diakui hak-hak dan kedaulatannya ke dalam Kesultanan Tidore, sebagai gantinya VOC berhak memonopoli perdagangan rempah-rempah dalam wilayah Kesultanan Tidore (Adnan Amal, 2007: 106).

Permusuhan antara Kesultanan Tidore dengan Belanda dimulai ketika pengangkatan Sultan Patra Alam, yang seharusnya menjadi hak Nuku atau Kamaludin. Pengangkatan ini menimbulkan protes hingga terjadinya perampasan dan pembakaran menentang pengangkatan tersebut. Pergolakan ini membuat Kamaludin ditangkap, sementara Nuku berhasil melarikan diri dan menghimpun kekuatan untuk melawan VOC (Sartono Kartodirdjo, 1981: 267). Di Papua, Nuku diangkat menjadi Sultan dan bergerilya melawan VOC. Pada 1794, Nuku mendapat dukungan dari Inggris serta rakyat Tidore hingga akhirnya berhasil mengusir VOC pada 12 April 1797 bersama dengan Inggris (Leonard Y. Andaya, 1993: 236).

Perlawanan melawan kolonialisme di Tidore hadir kembali pasca kemerdekaan Indonesia, dengan aktor utamanya Sultan Zainal Abidin. Sebagai keturunan Raja-Raja Tidore sebelumnya, ia paham betul bagaimana perjuangan Kesultanan Tidore untuk melawan Belanda. Pasca proklamasi, ia dihadapkan pada posisi mengembalikan

wilayahnya yaitu Irian Barat yang dipisahkan dari Tidore.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada April-September 2021 di Yogyakarta, dan Jakarta. Karena posisi dari Tidore sendiri sangat strategis dalam upaya pembebasan Irian Barat dan menarik untuk dikaji dalam perspektif yang lain, hal ini membuat penulis tertarik dengan kajian pembebasan Irian Barat dari perspektif Sultan Zainal Abidin. Penelitian ini mengkaji dalam aspek kewilayahan, politik, dan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang memiliki sifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode historis yang menekankan pada validasi data dan harus sesuai fakta agar sesuai dengan tujuan penelitian (Sartono Kartodirdjo, 1993: 62).

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini, meliputi: sumber-sumber tertulis yang diperoleh dalam bentuk dokumen, buku, jurnal, koran lama, hingga skripsi yang membahas tentang upaya dari Sultan Zainal Abidin dalam pembebasan Irian Barat. Kemudian menggunakan sumber lisan yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan yang mengetahui sepak terjang dari Sultan Zainal Abidin dalam usaha pembebasan Irian Barat. Sumber Visual menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti: buku, dokumen pribadi, arsip yang membahas pembebasan Irian Barat terutama dari Kesultanan Tidore.

Tahapan dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu: (1) Heuristik (pengumpulan sumber) yang merupakan langkah awal yang dilakukan dengan studi dokumen pengumpulan data dan sumber sejarah (2) Verifikasi (Kritik Sumber) yang merupakan langkah kedua dalam penelitian yang terdiri dari dua jenis kritik sumber, yaitu kritik internal yang berfungsi mencari keaslian dari isi dari suatu data sejarah dan kritik eksternal yang mencari keaslian dari keadaan fisik sumber sejarah (3) Interpretasi yang merupakan langkah ketiga yang digunakan untuk menafsirkan data yang sudah diperoleh untuk menemukan sebuah data baru. Langkah ketiga ini terbilang subjektif karena merupakan kesimpulan yang didapat oleh peneliti dalam menafsirkan data-data. (4) Historiografi yang merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah, proses ini merupakan penulisan data-data sejarah yang sudah terkumpul

dan telah melalui proses analisa dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Pasca Proklamasi Kemerdekaan

a. Rakyat Maluku

Keadaan Maluku pasca pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno, berbeda dengan keadaan yang ada di Jawa dan Sumatera. Di Maluku, keadaan sangat berbeda karena sejak masuknya Jepang di wilayah ini, masyarakat tidak diperkenankan mendengarkan siaran radio, terutama siaran luar negeri. Chasan Boesiri menuliskan dalam memoir-nya bahwa berita proklamasi kemerdekaan baru diketahui masyarakat Maluku pada awal September 1945 di kota Ternate dan daerah lain di Maluku Utara (Adnan Amal, 2007: 284).

Situasi saat itu jelas membuat beberapa pemimpin lokal Maluku, seperti Arnold Mononutu, M. A. Kamaruddin, Chasan Boesirie, dan lain-lain turut mendiskusikan bagaimana usaha kelanjutan rakyat Maluku Utara untuk menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Soekarno.



Gambar 1. Demo oleh Buruh Pelabuhan dengan tuntutan dibentuknya Provinsi Irian Barat.

Sebelum diadakannya Konferensi Denpasar pada 24 Desember 1946, diselenggarakan sebuah rapat raksasa di kota Ambon pada 13 November 1946. Rapat ini diinisiasi oleh Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) yang dihadiri oleh sekitar 3000 orang. Dalam rapat raksasa ini dihasilkan beberapa resolusi oleh rakyat Maluku Utara:

- 1) Terus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan tanah air Indonesia seluruhnya serta menyokong pemerintah NIT sesuai dengan putusan Dewan Maluku
- 2) Menuntut, serta memperjuangkan Irian tetap dalam RIS.

Pemisahan Irian Barat atas NIT juga terjadi penolakan di luar konferensi, seperti yang diberitakan oleh surat kabar Indonesia Timoer bahwa Raja-Raja Papua (Irian Barat) yang mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri NIT yaitu Ide Anak Gde Agung supaya Irian Barat dimasukkan ke dalam Negara Indonesia Timur.

b. Langkah Awal Belanda

Sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Belanda dalam memisahkan Irian Barat pasca kemerdekaan adalah ketika digelarnya Konferensi Malino di Makassar pada 16 sampai 24 Juli 1946. Dalam konferensi ini wilayah Indonesia dipecah menjadi negara federal, yang memungkinkan pihak Belanda memisahkan Irian Barat dari Indonesia. Di saat yang bersamaan, pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan melalui *Staatsblaad* No 69, yang bertanggal 15 Juli 1946 yang berisikan, bahwa seluruh daratan Irian dinyatakan sebagai Karesidenan sendiri dan diangkat J.P.K. van Eechoud sebagai residennya. Pembentukan ini membuat wilayah Irian lepas dari Karesidenan Maluku dan upaya dari Belanda untuk menguasai Irian sepenuhnya (Rustam Hasim, 2021: 1).

Sebagai langkah lanjut dari Konferensi Malino, diadakan sebuah konferensi lanjutan di Denpasar pada 7 hingga 24 Desember 1946. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari daerah Indonesia Timur yang kebanyakan adalah Raja atau Sultan pilihan dari H.J. van Mook. Sebanyak 71 perwakilan hadir dari Indonesia Timur termasuk di dalamnya Sultan Zainal Abidin.

Pada konferensi ini, Irian Barat menjadi salah satu topik pembahasan di dalamnya, yang mana wilayah Negara Indonesia Timur belum termasuk Irian Barat. Hal ini memancing perdebatan para perwakilan yang hadir dan membuat Sultan Zainal Abidin menunjukkan sikap keberatan atas pemisahan Irian Barat di dalam wilayah Negara Indonesia Timur. Tak hanya Sultan Zainal Abidin yang merasa keberatan, perwakilan lain seperti I Goesti Oka (Bali), E. Katoppo (Minahasa), Nadjamoedin Daeng dan Tadjoeudin Noer (Sulawesi Selatan) juga menunjukkan keberatannya. Hal ini dinyatakan oleh Sultan Zainal Abidin bahwa, sudah sejak dahulu wilayah Irian Barat masuk ke dalam Kesultanan Tidore dan karena itu Tidore memiliki hak penuh terhadap wilayah Irian Barat. (Rustam Hasim, 2015: 30).



Gambar 1. Pertemuan awal Konferensi Denpasar

Pada akhir Konferensi Denpasar pada 24 Desember 1946, terbentuklah sebuah negara baru yang dinamakan Negara Indonesia Timur (NIT) yang tergabung ke dalam bagian Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Wilayah NIT ini pun terdiri atas lima Karesidenan (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Bali, Lombok) (Putra Agung, Jakarta: 38).

2. Sultan Zainal Abidin Menolak Pemisahan Irian Barat

Dukungan terhadap Sultan Zainal Abidin dalam usahanya menolak pemisahan Irian Barat juga diberikan, seperti pada akhir Maret 1948, Arnold Mononutu (Wakil Ketua Parlemen NIT) datang dengan Rosihan Anwar (Jurnalis dari Warta Sepekan dan Siasat) ke Tidore. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Sultan Zainal Abidin di kediamannya. Dalam pertemuan ini, Sultan Zainal Abidin mengadakan sebuah rapat yang dihadiri sekitar 200 pimpinan dan Perserikatan Indonesia di Tidore. Arnold Mononutu mempertanyakan keyakinan pilihan untuk menolak pemisahan Irian Barat dari Kesultanan Tidore kepada Sultan Zainal Abidin.



Gambar 3. Sultan Zainal Abidin bertemu dengan Arnold Mononutu

Pada bulan Maret 1949, Sultan Zainal Abidin dengan Sultan Ternate diajak Belanda untuk menaiki kapal perang Belanda menuju Hollandia (Jayapura), yang di sana sudah hadir Wakil Mahkota Tinggi Kerajaan Belanda (Mahmud Raimadoya, 2021: Wawancara).

Sesampainya di Hollandia, ia dihidangkan dengan minuman yang memabukkan, namun Sultan Zainal menyadari intrik dari Belanda ini adalah jebakan dan mengingatkan agar tidak ada dari para utusan yang minum. Kedatangan Sultan Zainal Abidin ini telah memang sudah direncanakan dan disiapkan dengan mewah sebelum Konferensi Meja Bundar (KMB), harapannya dapat membuat Sultan Zainal Abidin mengubah keputusannya dalam masalah Irian Barat.

Seorang penasihat pemerintah Belanda bernama De Waal, pada 23 Maret 1949 mengirimkan surat atas nama Pemerintah Kerajaan Belanda di Indonesia kepada van Maarseven (Menteri Seberang Laut Kerajaan Belanda). Dalam suratnya, ia memberikan saran agar Irian Barat dipisahkan dari Kesultanan Tidore dengan cara memberikan tekanan ke kepala-kepala adat yang berada di wilayah tersebut agar mau memisahkan diri dari Kesultanan Tidore. Cara ini juga diikuti dengan saran lainnya agar Sultan Tidore diberikan peran dalam kabinet NIT dan diberikan tugas khusus untuk memisahkan Irian Barat dari Tidore.

Dalam telegram yang bertanggal 29 Maret 1949, van Maarseven memberikan usulan dalam pemisahan Irian Barat dengan keputusan dari Dr. Beel (Wakil Tinggi Mahkota Belanda). Usulan pertama, Kesultanan Tidore diintegrasikan dalam pemerintahan Federal Indonesia; dan kedua dilakukan jajak pendapat di daratan Irian Barat dan Kepulauan Raja Ampat. Langkah selanjutnya, disusun kerangka hukum yang berbentuk antara perjanjian pendek (*korte verklaring*) dan perjanjian lainnya yang berisikan klausul bahwa Kesultanan Tidore dapat disingkirkan setiap saat (Adnan Amal, 2007: 317).

Menanggapi hal tersebut, van Maarseven akan membuat kontrak politik dengan Sultan Tidore, yang berisikan:

1. *Korte Verklaring* yang sudah ditandatangani oleh Kesultanan Tidore dengan Pemerintah Hindia Belanda sejak 1909 agar dibatalkan. Pembatalan ini, Sultan Tidore tidak dapat memerintah lagi daerah kekuasaannya, yang artinya hanya dapat menjalankan pemerintahan atas Pulau Tidore.

2. Dengan berlakunya *Korte Verklaring*, Kesultanan Tidore secara administrative sudah tidak lagi dapat memerintah atas daerah Irian Barat.
3. Sejak perang pasifik Meletus, Irian Barat diduduki oleh sekutu dan residen menjalankan pemerintahan di sana atas dasar S. No. 108 jo. S. No. 149 (Nachrawy, 2003:65)

Pada 12 Juni 1949, van Maarseveen mengundang Sultan Zainal Abidin untuk membahas pemisahan daerah Irian Barat dari Kesultanan Tidore. Dalam pertemuan ini, Sultan Zainal Abidin dipaksa untuk menerima pemisahan Irian Barat dari Tidore dan mengumumkan bahwa seluruh Raja di daratan Irian dan Raja Ampat telah setuju untuk memisahkan diri dari Kesultanan Tidore. Hal ini membuat Sultan Zainal Abidin memprotes rencana yang dibuat Belanda dan mengadukan kepada Presiden NIT Cokorde Gde Sukawati, namun aduan itu tidak mendapat respon yang serius.

Diberitakan koran Belanda, *Algemeen Niews en Telegraaf Agenstchap* (ANETA) atau *General News and Telegraph Agency* pada 21 Juli 1949, Tokoh-tokoh dari Irian yang tergabung ke dalam Panitia Penentu Nasib Sendiri mengatakan bahwa rakyat Irian tidak ingin dipisah oleh Kesultanan Tidore, kenyataan ini berbanding dengan apa yang dikatakan oleh Belanda. Langkah yang diambil oleh Belanda selanjutnya adalah mengubah status swapraja di Tidore dan mningkatkannya menjadi *onderafdeling* yang kemudian Sultan Zainal Abidin diangkat menjadi residen Maluku utara menggantikan Sultan Iskandar Jabir Syah dari Ternate (Abdul Haris Fathgehipon, :180).

Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dilaksanakan Konferensi yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, yang dihadiri oleh delegasi Indonesia, Belanda dan *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO). Pada konferensi ini menghasilkan kesepakatan bahwa penyerahan kedaulatan sepenuhnya tanpa syarat kepada Indonesia akan diberikan paling lambat pada 30 Desember 1949, yang meliputi seluruh daerah bekas jajahan Hindia Belanda, kecuali Irian Barat.

Pasca Konferensi Meja Bundar, diadakan sebuah rapat yang digelar pada 19 November

1949 untuk menerima hasil dari KMB dan *Draft Undang-Undang Dasar Sementara* dari Republik Indonesia Serikat. Pada kesempatan ini Sultan Zainal Abidin menunjukkan tekad kuat yang dimilikinya dalam penolakan pemisahan Irian Barat dari wilayah Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari yang diperoleh pada KMB.

Kemudian jawaban atas penolakan Sultan Zainal Abidin diberikan oleh Perdana Menteri NIT pada tanggal 28 November 1949. Anak Agung Gde memberikan penjelasan terhadap penolakan yang diberikan oleh Sultan Zainal Abidin, bahwa pembahasan mengenai Irian Barat terlalu cepat untuk dibicarakan dalam situasi yang sedang tidak stabil ini pasca KMB. Pada kesempatan ini, Sultan Zainal Abidin mengajukan permohonan agar diberikan kesempatan untuk menjelaskan sikapnya mengenai tidak dimasukkannya Irian Barat masuk ke dalam (NIT)

“Paduka Tua Ketua yang Utama, Saya selaku Kepala Kerajaan Tidore dengan banyak penyesalan tidak dapat menyetujui hasil-hasil Konferensi Meja Bundar karena dengan hasil tersebut kerajaan saya, walaupun untuk sementara waktu telah dipisahkan, yaitu satu bagian masuk dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat dan lain bagian ialah Irian Barat termasuk di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda. Pada akhirnya saya kemukakan, bahwa dalam keterangan yang pendek ini, dapat diambil kesimpulan, bahwa Kerajaan Tidore tetap mempertahankan haknya atas bagian Irian yang menurut sejarah termasuk dalam lingkungan Kerajaan Tidore. Sekianlah, Terimakasih.” (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985: 668)

Setelah diskusi dan penyampaian pendapat yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin, forum mengadakan pemungutan suara atas hasil dari KMB dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat. Pemungutan suara ini menghasilkan suara sebanyak 49 orang memberikan suara setuju atas hasil KMB, sementara satu suara yaitu Sultan

Zainal Abidin menolak. Dengan hasil ini maka forum menyatakan bahwa naskah disetujui parlemen.

Pasca bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950, Sultan Zainal Abidin menghadiri sebuah rapat dengan Belanda yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada rapat ini PBB menyampaikan tiga opsi untuk Sultan Zainal Abidin: pertama, Irian Barat bersama Tidore sebagai negara yang merdeka; kedua, Irian Barat bersama Tidore berdaulat di bawah kerajaan Belanda; ketiga Irian Barat bersama Tidore Bersatu dengan Indonesia. dari opsi yang disampaikan, Sultan Zainal Abidin memilih opsi yang ketiga dengan bergabung bersama Indonesia.



Gambar 4. Pelantikan Sultan Zainal Abidin sebagai Gubernur Irian Barat.

Atas dasar sikap yang tegas menolak memisahkan Irian Barat dari Tidore dan Indonesia, membuat Presiden Soekarno meminta Sultan Zainal Abidin untuk membantu mengklaim Irian Barat yang kemudian pada 17 Agustus 1956 mengangkat Sultan Zainal Abidin sebagai Gubernur Irian Barat. Sultan Zainal Abidin menyambutnya dengan baik dan menawarkan Soa-sio sebagai Ibukota Provinsi perjuangan Irian Barat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Peran Sultan Zainal Abidin serta masyarakat Maluku Utara dalam upayanya membela dan mempertahankan wilayah Irian Barat dari cengkeraman Belanda dinilai sangat berhasil, berkat dari penolakan Sultan Zainal Abidin dalam berbagai upaya pemisahan Irian Barat melalui berbagai Konferensi.

Penelitian ini menemukan upaya yang besar dari Sultan Zainal Abidin dan Masyarakat Maluku Utara pada umumnya dalam menolak pemisahan Irian Barat dari Indonesia.

Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yang terkait, agar bisa menemukan sumber primer yang berasal dari Maluku Utara langsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Bapak Mahmud Raimadoya (Anak dari Sultan Zainal Abidin) atas kesediannya menjadi narasumber dalam penelitian.

REFERENSI

- Adnan Amal. (2007). *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Jakarta: Gora Pustaka Indonesia.
- Ide Anak Agung Gde Agung. (1985) *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sartono Kartodirdjo. (1981). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta; PT. Gramedia.
- Andaya, Leonard. (1993). *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Herry RD. Nachrawy. (2003). *Peranan Ternate Tidore dalam Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Kie Raha.
- Putra Agung. (2007). Perjuangan yang tak Kunjung Selesai. *Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*, 13(13), 36.
- Abdul Haris Fathgehipon. (2020). Sultan Zainal Abidin Syah: From Kingdom of Tidore to the Republic of Indonesia. *Tawarikh*, 12(1), 180. DOI: <https://doi.org/10.2121/tawarikh.v12i1.1370>
- Rustam Hasyim & M. Mansur. (2015). Sultan Ternate Iskandar Jabir Syah: Dari Konferensi Malino Hingga Menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950. *Etnohistori*. 2(1), 30. DOI: <http://dx.doi.org/10.33387/jeh.v2i1.820>
- Rustam Hasyim & Rasty Amalia Faroek. (2021). Sultan Tidore Zainal Abidin Alting: Dari Konferensi Denpasar Hingga Menjadi Gubernur Pertama Papua 1946-1956. *GeoCivic*. 4(1). 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.33387/geocivic.v4i1.3204>